



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 15918-15926

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Pengaruh Penerapan Smart Card terhadap Lingkungan Masyarakat

Silvia Amanda<sup>1✉</sup>, Rayyan Firdaus<sup>2</sup>

Universitas Malikussaleh

Email: [silvia.220420016@mhs.unimal.ac.id](mailto:silvia.220420016@mhs.unimal.ac.id)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Salah satu ide dari Kota Cerdas adalah program Smart Card. Undang-undang No. 23 tahun 2014 yang mengatur pemerintahan daerah, bab XXI, yang berjudul "Inovasi Daerah Pasal 386-390," mengatur inisiatif ini, yang merupakan inovasi daerah. Menurut undang-undang tersebut, pemerintah daerah harus memunculkan ide-ide baru untuk memajukan pembangunan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak penggunaan Smart Card terhadap lingkungan sekitar. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif deskriptif yang mencakup tinjauan literatur. Penerapan Smart Card berdampak pada lingkungan masyarakat, menurut temuan penelitian, salah satunya adalah kartu tersebut digunakan untuk membantu urusan administrasi pemerintah. Hubungan antara masyarakat dan pemerintah dalam meningkatkan layanan publik berada di urutan kedua. Ketika sebuah kartu dihubungkan dengan aplikasi yang telah diatur sebelumnya yang melacak waktu masuk dan pulang siswa, kartu tersebut dapat digunakan, misalnya, untuk melacak kehadiran mereka di sekolah dan mengirimkannya kepada orang tua.

Kata Kunci: *Smart Card, Lingkungan, Masyarakat*

## Abstract

One of the ideas of a Smart City is the Smart Card program. Law no. 23 of 2014 which regulates regional government, chapter XXI, entitled "Regional Innovation Articles 386-390," regulates this initiative, which is a regional innovation. According to this law, regional governments must come up with new ideas to advance regional development. This research aims to determine the impact of using Smart Cards on the surrounding environment. This research uses a descriptive qualitative methodology that includes a literature review. The implementation of Smart Cards has an impact on the community environment, according to research findings, one of which is that the cards are used to assist with government administrative matters. The relationship between society and government in improving public services is in second place. When a card is linked to a preset app that tracks students' check-in and check-out times, the card can be used, for example, to track their attendance at school and send it to parents.

Keywords: *Smart Card, Environment, Society*

## PENDAHULUAN

Saat ini, gaya hidup masyarakat dapat bergeser dari tradisional ke digital berkat kemajuan teknologi (Nainggolan & Sd, 2018). Pemerintah dan kota harus bersaing dengan negara dan wilayah lain sebagai hasil dari transformasi digital (Meiwanda, 2020). Pada akhirnya, seiring dengan perkembangan digitalisasi, pola perilaku masyarakat pun berubah dalam hal etika, budaya, dan konvensi (Cahyono, 2016). Pada kenyataannya, perubahan ini menimbulkan sejumlah masalah pada manusia dan infrastruktur perkotaan. Masalah-masalah pada kota mengarah pada pengembangan beberapa pendekatan untuk mengatur kota secara efektif. Konsep "kota pintar" pertama kali muncul sekitar tahun 2009. Penelitian menunjukkan bahwa dalam lima tahun sejak saat itu, istilah "kota pintar" telah menjadi lebih banyak digunakan secara global, mempengaruhi rencana perencanaan kota di kota-kota besar dan kecil (Dameri and Sabroux, 2014)

Untuk mengatasi masalah-masalah besar dan rumit, kota pintar menjadi sesuatu yang penting. Semakin banyaknya masalah perkotaan dianggap dapat dikelola oleh kota pintar. Implementasi kota pintar menjadi praktik umum di kota-kota sebagai sarana untuk mengatasi masalah perkotaan secara holistik. Gagasan ini berawal dari sejumlah masalah perkotaan, termasuk banjir, penumpukan sampah di tengah kota, daerah aliran sungai yang terkontaminasi, kemiskinan, pengangguran, menurunnya angka partisipasi sekolah, kemacetan lalu lintas yang tidak terselesaikan, dan layanan publik yang kurang dimanfaatkan (Perdana, 2019). Menentukan konsep, tata letak, dan karakter kota cerdas adalah tujuannya. Menurut Triyandra dan Rimayanti (2017), terdapat enam komponen

utama dari kota cerdas: mobilitas cerdas, lingkungan cerdas, ekonomi cerdas, masyarakat cerdas, kehidupan cerdas, dan pemerintahan cerdas.

Kota-kota besar di Indonesia telah memanfaatkan teknologi untuk membantu mereka maju dalam segala aspek kehidupan mereka. Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Malang, Balikpapan, Makassar, dan Pekanbaru adalah beberapa dari sekian banyak kota besar di Indonesia yang telah mengadopsi ide kota pintar (Triyandra & Rimayanti, 2017). Oleh karena itu, ide kota pintar merupakan pengganti yang signifikan untuk menyelesaikan masalah perkotaan yang belum terselesaikan di banyak kota di Indonesia dan bahkan di seluruh dunia.

Salah satu gagasan dari Kota Cerdas adalah program Kartu Pintar. Undang-undang No. 23 tahun 2014 yang mengatur pemerintahan daerah, bab XXI, yang berjudul "Inovasi Daerah Pasal 386-390," mengatur inisiatif ini, yang merupakan inovasi daerah. Menurut undang-undang tersebut, pemerintah daerah harus memunculkan ide-ide baru untuk memajukan pembangunan daerah. Kota-kota di Indonesia memimpikan ide ini karena dianggap dapat mengatasi sejumlah masalah perkotaan seperti kemacetan, penumpukan sampah, dan keselamatan publik. Sebagai hasil dari inovasi, konsep kota pintar juga telah diterapkan di sejumlah kota besar di Indonesia (Triyandra & Rimayanti, 2017). Di sini, "ide, praktik, atau objek yang dianggap baru oleh individu" ditafsirkan sebagai inovasi. (Konsep, perilaku, atau hal yang dianggap baru oleh individu) (Rogers, 1962). Dengan demikian, cara di mana individu dan organisasi dapat merangkul konsep baru, masalah pragmatis, atau item tertentu (Wahid & Amalia, 2020).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tinjauan literatur sebagai sarana pengumpulan data bersama dengan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Tinjauan literatur mengkaji informasi dari berbagai buku referensi dan temuan penelitian terdahulu yang relevan untuk memberikan kerangka teoritis bagi masalah yang diteliti. Istilah "penelitian kepustakaan" digunakan untuk menggambarkan studi literatur. Penelitian lapangan tidak diperlukan karena kendala kegiatan ini; sebagai gantinya, artikel, jurnal, dan koleksi perpustakaan dihasilkan. Sumber-sumber penelitian ini meliputi buku, jurnal nasional, esai, dan tesis terdahulu yang membahas topik penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejumlah karya ilmiah telah mencatat bahwa teknologi informasi memainkan peran penting dalam memungkinkan kota pintar (Ardiani, 2018; Noor, 2018; dan Imran & Armawan, 2019). Hal ini terutama berlaku dalam hal big data, yang merupakan kebutuhan digital bagi masyarakat perkotaan (Wahyudin, 2018 dan Suharmanto, 2019) (Nam & Pardo, 2011). Untuk mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat perkotaan, kota-kota di seluruh dunia termasuk Indonesia mulai mengadopsi kota pintar berbasis teknologi (Hasibuan & Sulaiman, 2019). Dengan tujuan memaksimalkan produktivitas dan meminimalkan waktu henti, ide kota pintar menawarkan layanan kepada masyarakat.

Produk Smart Card Madani merupakan salah satu contoh penerapan smart city di Kota Pekanbaru. Tujuan dari produk ini adalah untuk membuat layanan di berbagai sektor dapat diakses dengan mudah. Selain sebagai alat untuk aktivitas perbankan dan non perbankan, Smart Card Madani juga menyediakan layanan publik bagi pemerintah kota Pekanbaru. Selain itu, kartu pintar ini berfungsi sebagai kartu identitas masyarakat dan menggantikan uang kartal (Pemerintah Kota Pekanbaru, 2019; diakses pada 10 Februari 2018 melalui <http://pekanbaru.go.id>). Produk Smart Card Madani dapat berfungsi sebagai anjungan tunai mandiri (ATM) dan sarana bagi masyarakat untuk bertransaksi. Masyarakat dapat lebih mudah dan cepat mendapatkan layanan publik yang lebih baik berkat produk ini. Smart Card Madani adalah salah satu produk inovasi pemerintah Kota Pekanbaru yang hadir dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi di era milenial dan digital. Awalnya, pada tahun 2016, pemerintah Kota Pekanbaru mulai merancang hingga akhirnya diluncurkan pada bulan Agustus 2017. Menurut Putra, program ini baru efektif penggunaannya di bulan Januari 2018 dan mulai didistribusikan terutama ke pegawai pemerintahan. Pada tahun itu pula telah didistribusikan ke masyarakat yang dilakukan pihak bank dengan cara mengganti kartu ATM lama dengan kartu Smart Card Madani

Sebagai penerima kartu pintar, penduduk Kota Pekanbaru juga menyadari adanya perubahan struktur dan metodologi layanan berbasis web. Program unggulan pemerintah, kartu pintar Madani, diterima oleh masyarakat. Masyarakat kota memahami pentingnya tatanan kota pintar yang baru, itulah sebabnya inovasi ini diadopsi (Noor, 2018). Pemerintah telah mulai menggunakan smart card, dan masyarakat dapat mempelajari lebih lanjut tentang kartu ini dari berbagai sumber, termasuk media sosial, media cetak, spanduk, dan media massa. Bank-bank yang beroperasi mirip dengan ATM adalah saluran distribusi untuk produk ini (Putra, 2019).

Produk yang dipasarkan sebagai kartu pintar Madani ini berdampak pada persepsi masyarakat terhadap “budaya baru”. Pemerintah mengantisipasi bahwa perubahan perilaku positif akan digunakan untuk menentukan apakah program ini berhasil atau tidak. Misalnya, mengubah perilaku anggota staf yang biasanya datang terlambat. Karyawan hanya perlu menempelkan kartu ini pada aplikasi yang diberikan untuk dicatat ketika mereka datang dan pergi. Pada kenyataannya, hal ini akan membuat orang berperilaku lebih tertib dan teratur. Budaya digital akan mengkristal sebagai hasil dari ide ini. Betapa masyarakat akan lebih terbuka dalam menggunakan dan mengadopsi perangkat teknologi untuk mempermudah segala sesuatunya. Kemudahan transaksi non-tunai menjadi budaya baru, untuk menggantikan kebiasaan lama (Putra, 2019).

Pemerintah menetapkan standar yang tinggi untuk program kartu pintar ini, terutama dalam hal penyediaan layanan masyarakat yang luar biasa. Tanggapan masyarakat menunjukkan bahwa mereka puas dengan layanan pemerintah. Dengan kata lain, masyarakat akan puas jika pemerintah menawarkan layanan yang berkualitas. Kemajuan teknologi saat ini memberikan dukungan substansial bagi pelayanan prima melalui berbagai program pemerintah (Saptadi et al., 2019). Hal ini terutama terjadi pada industri perbankan (Akmalia & Rikumahu, 2020) dan pembangunan masyarakat pedesaan (Badri, 2016). Munculnya globalisasi digital telah memungkinkan pemerintah untuk mengadopsi perspektif baru tentang peran teknologi informasi dalam memberikan layanan yang cepat, akurat, dan tepat. Pemanfaatan data aplikasi oleh masyarakat dan pemerintah untuk memberikan ide dan kritik yang cepat, akurat, dan mudah diperkirakan akan semakin meluas karena adanya tren administrasi kota pintar (Saptadi et al., 2019). Sebagai ukuran dukungan moral masyarakat terhadap pemerintah, kepuasan dan kepercayaan publik dalam interaksi mereka dengan pemerintah akan menjadi kekuatan (Putra, 2019).

Perangkat kartu pintar yang inovatif melayani berbagai tujuan dalam memenuhi kebutuhan layanan Kota Pekanbaru. Teknologi akan membuat segala sesuatu yang berhubungan dengan pemerintahan menjadi lebih mudah. Telah diketahui bahwa kartu pintar ini dapat digunakan sebagai alat untuk membuat penawaran layanan pemerintah menjadi lebih mudah. Keamanan publik, real estate, transportasi, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan kota lainnya merupakan contoh layanan pemerintah (Bajri & Irwansyah, 2019). Hidup di era internet digital juga telah mengubah gaya hidup masyarakat (Ardiani, 2018). Alhasil, tujuan dari integrasi teknologi adalah untuk meningkatkan pelayanan publik, berbagi informasi dengan masyarakat, dan meningkatkan efisiensi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kualitas masyarakat (Wahid & Amalia, 2020; Hasibuan &

Sulaiman, 2019). Namun, penggunaan teknologi secara keseluruhan harus dilakukan dengan cara yang terkoordinasi dan cerdas.

Dalam situasi ini, pemerintah bertujuan untuk menawarkan sebuah ide yang komprehensif. Konsep kota pintar harus mengintegrasikan empat elemen: 1) Manusia (pengguna), termasuk moralitas dan karakter, kepatuhan terhadap kebijakan; 2) Mekanisme dan standar layanan, termasuk pola hubungan pemangku kepentingan dan mekanisme untuk mengintegrasikan layanan publik dan data; 3) Infrastruktur TIK, yang memungkinkan integrasi layanan publik dan data (informasi); dan 4) Struktur kelembagaan kota cerdas, yang mengelola analis, integrator, evaluator, dan tata kelola TI dengan proses bisnis. Keberlanjutan inisiatif pembangunan yang dimulai oleh pemerintah daerah akan dipantau oleh lembaga kota pintar (Hasibuan & Sulaiman, 2019). Dalam hal penanganan dan pendaftaran data pribadi, pemerintah berupaya meningkatkan kualitas layanan publik, yang dapat menjadi tantangan dan lambat. Dengan cara ini, layanan dapat diberikan dengan lebih cepat, mudah, dan akurat. Untuk keperluan tabungan, kartu pintar ini juga dapat digunakan sebagai ATM. Kartu ini juga dapat digunakan sebagai uang elektronik untuk membayar hal-hal lain seperti tol, biaya parkir, dan belanja. Penggunaan uang tunai saat ini sedang dibatasi oleh pemerintah (Putra: Wawancara, 2019).

Kartu ini memiliki manfaat untuk memfasilitasi kemampuan pemerintah dalam memberikan layanan kepada masyarakat dengan cepat dan efisien. Keunggulan produk ini adalah kemampuannya untuk mempercepat prosedur pendaftaran dan layanan lainnya saat menangani administrasi pemerintah. Layanan kenyamanan seperti kemampuan untuk membayar parkir, tol, dan belanja dengan kartu menjadi semakin banyak tersedia bagi masyarakat. Ada banyak manfaat yang terkait dengan kartu pintar ini yang benar-benar membantu masyarakat dalam mengakses layanan (Putra, 2019).

Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Dinas Perhubungan merupakan tiga kantor pemerintah yang menjadi fokus utama pemerintah Kota Pekanbaru dalam implementasi penggunaan Kartu Indonesia Pintar. Ketiga organisasi ini dianggap sebagai pusat pelayanan publik yang memiliki akses langsung terhadap kebutuhan masyarakat. Kartu ini digunakan di Dinas Kesehatan tidak hanya untuk pelayanan, tetapi juga untuk menyimpan informasi dan perkembangan kesehatan pasien. Setiap pasien memiliki database termasuk data pribadi yang berkaitan dengan penyakit yang mereka alami. Database tersebut dapat diakses selama layanan kesehatan dan disimpan dengan aman di kartu pintar Madani.

Sementara itu, kartu pintar digunakan di Dinas Pendidikan sebagai bagian dari sekolah pintar, yang berfungsi sebagai alat untuk transaksi di kantin sekolah dan untuk melacak

kehadiran. Sistem absensi untuk pengajar, yang sebelumnya mengandalkan sidik jari atau biometrik serupa, telah dimodifikasi. Para guru dapat menggunakan kartu pintar yang disediakan oleh pemerintah Kota Pekanbaru untuk melakukan absensi dengan cara yang mirip dengan kartu identitas multiguna. Metode pembayaran di kantin sekolah juga telah berubah sebagai hasil dari penerapan smart school untuk siswa. Hanya dengan menggunakan smart school, siswa dapat berbelanja tanpa perlu membawa uang tunai sebagai alat transaksi. Kartu ini akan dikembangkan sebagai alat transaksi untuk jenis transaksi lainnya, seperti pembayaran uang sekolah, pada tahap berikutnya.

Putra mengklaim bahwa salah satu inisiatif Kota Pekanbaru untuk mengembangkan kota pintar adalah program Smart card (Putra, 2019). Tentu saja, tujuan dari inisiatif ini adalah untuk mengurangi kebutuhan akan uang tunai dengan membantu masyarakat mengelola layanan administratif yang disediakan oleh pemerintah Kota Pekanbaru. Cara lain untuk menghemat uang adalah dengan kartu ini. Berdasarkan temuan studi, program ini bertujuan untuk mencapai tiga tujuan utama. Pertama, untuk mempromosikan budaya menabung di kalangan peserta dengan menggunakan teknologi kartu pintar. Ketiga, untuk meningkatkan layanan publik; dan kedua, untuk mempromosikan penggunaan uang elektronik. Sebagai hasilnya, gagasan bahwa satu kartu dapat menyelesaikan semua masalah muncul (Putra, 2019).

Program ini memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dalam rangka memenuhi tuntutan pemerintah Kota Pekanbaru. Integrasi data, termasuk nama dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang melekat pada kartu, menjadi keunggulan kartu pintar ini. Tanpa mengisi formulir, masyarakat sudah bisa mengambil nomor antrian dengan menghubungkan kartu tersebut ke aplikasi yang telah disediakan secara khusus. Tidak perlu membawa KTP karena data yang ada di dalam kartu, termasuk nama dan NIK, sangat berguna. Kartu ini bahkan digunakan untuk membayar tunjangan karyawan dan melacak kehadiran karyawan. Menurut Putra (2019), kartu pintar memiliki kemampuan untuk meringkas waktu pelayanan, sehingga meningkatkan efisiensi dan kecepatan.

Tujuan dari kartu pintar Madani adalah untuk memudahkan masyarakat bertransaksi dalam berbagai situasi. Situasi ini termasuk e-Wallet, dompet elektronik, uang elektronik, dan pembayaran pengembalian sampah untuk mencegah penipuan (Putra, 2019). (Hidayat, 2019). Interaksi antara pemerintah dan pemerintah adalah yang pertama dalam daftar keuntungan yang diberikan oleh program ini. Kartu ini hadir untuk membantu masalah administrasi yang berkaitan dengan pemerintah. Yang kedua adalah bagaimana masyarakat dan pemerintah bekerja sama untuk meningkatkan pelayanan publik. Sebagai contoh, kartu

ini digunakan untuk melacak kehadiran siswa di sekolah, yang digabungkan dengan aplikasi yang telah diatur sebelumnya untuk memberikan laporan kepada orang tua tentang waktu kedatangan dan kepulangan siswa. Ketiga, interaksi antara negara dan sektor swasta, yaitu untuk meningkatkan kualitas layanan perizinan, yang pada gilirannya dapat memicu munculnya sektor-sektor ekonomi baru, seperti ekonomi digital, karena uang elektronik digunakan dalam transaksi. Menurut Putra (2019), pemanfaatan teknologi telah menghasilkan pengakuan terhadap “budaya baru”.

## SIMPULAN

Sebuah produk inovatif bernama Kartu Pintar Madani diciptakan untuk memudahkan masyarakat Kota Pekanbaru dalam mengakses layanan. Keberadaan produk ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam kehidupan sehari-hari masyarakat perkotaan, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan dalam segala bentuknya. Internet menjadi dasar dari desain Smart Card Madani, yang membuat penyelesaian masalah menjadi lebih mudah. Di beberapa industri, produk ini dapat menangani masalah dengan sukses dan efisien, meskipun belum dianggap ideal. Lingkungan ini mendapat manfaat dari sejumlah layanan pemerintah, termasuk transportasi, kesehatan, pendidikan, dan administrasi kota.

Pada akhirnya, program ini mengubah manusia menjadi manusia digital dan mengadopsi “budaya baru” dalam sikap dan perilaku mereka. Masyarakat urban mengalami perubahan karena platform budaya baru yang muncul sebagai sebuah penemuan. Melalui penggunaan ide komunikasi inovasi, perubahan dicapai melalui pendekatan yang integratif dan partisipatif. Kartu Pintar Madani digunakan untuk mulai mengimplementasikan perubahan yang telah direncanakan oleh pemerintah. Penyebaran inovasi dan komunikasi inovasi adalah konsep yang sering kali dipertentangkan. Fungsi komunikasi adalah untuk menyebarkan inovasi sebagai pesan kepada masyarakat, mendorong adopsi inovasi tersebut dan menghasilkan pergeseran norma budaya. Dalam kerangka kerja ini, pembangunan dikaitkan dengan platform perubahan yang dianggap tepat untuk menyelesaikan berbagai masalah masyarakat. Kartu Indonesia Pintar Madani merupakan produk inovasi yang mengubah sikap dan perilaku masyarakat perkotaan. Perubahan yang diharapkan adalah menuju pengembangan masyarakat cerdas berbasis teknologi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aji, A. B., & Slamet, P. U. & J. (2019). Strategi Difusi Inovasi BKKBN dalam Menjangkau Generasi Digital Natives. *Research Fair Unisri*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.33061/rsfu.v3i1.2572>.
- Akbar, M. F., Putubasai, E., & Asmaria, A. (2019). Peran Komunikasi dalam Pembangunan Masyarakat. *Komunika*, 2(2), 111–127. <https://doi.org/10.24042/komunika.v2i2.6027>.
- Akmalia, A. N., & Rikumahu, B. (2020). Analisis Tingkat Adopsi Layanan Perbankan Digital Menggunakan Teori Difusi Inovasi (Objek Studi: Jenius oleh Bank BTPN di Kota Bandung dan Jakarta). *Jurnal Mitra Manajemen*, 4(8), 1196–1207.
- Alawadhi, S., Aldama-Nalda, A., Chourabi, H., Gil-Garcia, J. R., Leung, S., Mellouli, S., Nam, T., Pardo, T. A., Scholl, H. J., & Walker, S. (2012). Building Understanding of Smart City Initiatives. In H. J. Scholl, M. Janssen, M. A. Wimmer, C. E. Moe, & L. S. Flak (Eds.), *Electronic Government* (pp. 40–53). Springer. [https://doi.org/10.1007/978-3-642-33489-4\\_4](https://doi.org/10.1007/978-3-642-33489-4_4).
- Amanah, S. (2010). Peran Komunikasi Pembangunan dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 8(1), Article 1. <https://doi.org/10.46937/820105691>.
- Ardiani, Y. M. (2018). Smart City, Kota Pintar–Sistem dan Perangkat Pendukung. *Snatif*, 5(1), Article 1. <https://conference.umk.ac.id/index.php/snatif/article/view/1>.
- Badri, M. (2016). Pembangunan Pedesaan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (Studi pada Gerakan Desa Membangun). *Jurnal Dakwah Risalah*, 27(2), 62–73. <https://doi.org/10.24014/jdr.v27i2.2514>.
- Bajri, R. A. D., & Irwansyah, I. (2019). Tujuh 'C' dalam Program Humas Jakarta Smart City. *Inter Script: Journal of Creative Communication*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.33376/is.v1i1.349>.
- Nuryanto, B.A., (2017). SMART CARD DRAWING WALL' Inovasi Kampung Wisata Code berbasis Optocoupler Guna Meningkatkan Kepedulian Masyarakat Terhadap Budaya Yogyakarta. *Jurnal Ilmiah Penelitian dan Penalaran Mahasiswa*.
- Reza, M. (2019). PEMANFAATAN TEKNOLOGI RFID MELALUI KARTU IDENTITAS UNTUK LINGKUNGAN KANTOR. *Selodang Mayang: Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir*, 5(3), 164.